

Bantul

Jurnal Riset Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Kabupaten Bantul

JRD

ISSN: 1412-8519 (media cetak)

ISSN: 2829-2227 (media online)

EVALUASI MIKRO DAN DAMPAK DANA KEISTIMEWAAN DALAM UPAYA PEMERATAAN PENDAPATAN

Oleh

Yulyana Purwaningsih, SE., M.Si

Perencana Ahli Muda Bappeda Kabupaten Bantul

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

yulyana5379@gmail.com

ABSTRAK

Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan pembangunan daerah mendapatkan alokasi dana keistimewaan dari DI Yogyakarta. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun pendek untuk mengukur dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan melalui penentuan sasaran daerah dan berbagai macam program pembangunan digunakan indikator sasaran daerah. Rasio Gini menjadi salah satu indikator sasaran daerah dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Tahun 2024 Rasio gini mengalami penurunan Rasio Gini sebesar 0,021 dibanding tahun 2023 dari 0,454 menjadi sebesar 0,417. Dari hasil evaluasi menggunakan metode DAC diperoleh kesimpulan bahwa secara relevansi, efisiensi, efektifitas dana keistimewaan berdampak pada peningkatan produktivitas, pemerataan pendapatan, inflasi dan kemiskinan (secara mikro) yang diharapkan dapat menurunkan rasio gini (secara makro).

Keywords : Dana Keistimewaan, Rasio Gini.

I. PENDAHULUAN

Dana keistimewaan merupakan jenis dana transfer pusat ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan khususnya DI Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam Undang-

Undang mengenai keistimewaan Yogyakarta. Kabupaten Bantul sebagai bagian dari DI Yogyakarta juga mendapatkan alokasi dana keistimewaan, penggunaan dana ini bertujuan untuk membantu atau mendukung program

kegiatan prioritas provinsi yang berada di wilayah kabupaten di bidang urusan kelembagaan dan tatalaksanaan, urusan kebudayaan, urusan pertanahan dan urusan tata ruang. Evaluasi terhadap rencana pembangunan daerah merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan daerah. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan, pemerintah daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun pendek untuk mengukur dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan melalui

penentuan sasaran daerah dan berbagai macam program pembangunan digunakan indikator sasaran daerah. Indikator sasaran daerah dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD. IKU terdiri dari IKU pemerintah kabupaten (indikator sasaran daerah) dan IKU perangkat daerah. RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 ditetapkan 11 sasaran daerah dengan 19 indikator kinerja.

Rasio Gini menjadi salah satu indikator sasaran daerah terwujudnya pemerataan pendapatan yang menjadi perhatian. Pada tahun 2023, rasio gini Kabupaten Bantul berdasarkan rilis BPS Kabupaten Bantul sebesar 0,454, hal ini berarti pemerataan hasil pembangunan belum dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Penduduk Kabupaten Bantul sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani. Pada tahun 2023 dikarenakan cuaca kemarau panjang seharusnya tanam di tahun 2023 mundur tanam di tahun 2024, sehingga produksi pertanian menurun dan berdampak pada pendapatan petani. Dari segi tenaga kerja, terjadi penambahan jumlah tenaga kerja

buruh harian lepas. Tetapi kenaikan jumlah tenaga kerja buruh harian lepas tersebut dari segi pendapatan masih sangat kecil. Pada Tahun 2024 mulai mengalami perbaikan ditandai dengan penurunan Rasio Gini sebesar 0,021 dibanding tahun 2023 menjadi sebesar 0,417.

Faktor pendorong penurunan Rasio Gini adalah mulai berkembangnya industri kerajinan dan kuliner di masyarakat dan tumbuhnya industri-industri yang bergerak dalam ekonomi kreatif serta adanya pemberian bantuan sosial. Adapun yang menjadi faktor penghambat kecilnya penurunan Indeks Gini adalah: 1) Tingkat kemiskinan yang masih relative tinggi; 2) Upah yang diterapkan di Kabupaten Bantul relatif rendah; dan 3) Investasi yang tidak merata. Upaya meningkatkan perekonomian penduduk berpendapatan menengah ke bawah, akan mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun peningkatan pemerataan pendapatan tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mengalokasikan bantuan untuk masyarakat menengah ke bawah, tetapi juga memerlukan dukungan dari masyarakat golongan ekonomi tinggi.

Dilatarbelakangi hal tersebut, kajian ini akan berfokus peranan dana keistimewaan yang telah diintervensikan di Kabupaten

Bantul pada perangkat daerah penanggung jawab capaian sasaran kinerja rasio yaitu pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan (DKPPP), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP), dan Dinas Pariwisata.

II. KERANGKA PIKIR EVALUASI

Kajian evaluasi merupakan penilaian sistematis tentang nilai atau manfaat waktu, uang, tenaga, dan sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan umum dari sebagian besar evaluasi adalah untuk mengumpulkan dan menyimpulkan informasi yang berarti dari audiens dan memberikan wawasan yang berharga kepada evaluator sebagai umpan balik yang berguna dalam pengambilan keputusan. Development Assistance Committee (DAC) merupakan lembaga international di bawah naungan Bank Dunia yang memiliki peran kuat dalam evaluasi pembangunan sejak tahun 1991 (Chianca, 2008). DAC menyusun sebuah dokumen prinsip-prinsip dan lima kriteria kunci sebagai alat fungsi pemantauan dan evaluasi, yaitu:

1. Relevansi, yaitu nilai kesesuaian sejauh mana program telah berjalan sesuai

- dengan kelompok sasaran dan penerima.
2. Efektivitas, yaitu merupakan ukuran sejauh mana suatu program telah mencapai tujuannya. Kriteria efektivitas ini harus dikaitkan secara erat dengan kriteria dampak yang tidak hanya mengkaji dari sisi positif namun juga dari sisi negatif.
 3. Efisiensi, yaitu merupakan pengukuran tingkat efisiensi dari output program, baik kualitatif maupun kuantitatif yang berhubungan dengan input. Dengan kata lain, sejauh mana sebuah program menggunakan sumber daya semurah mungkin untuk mencapai hasil yang diinginkan.
 4. Dampak, yaitu merupakan perubahan baik yang bersifat positif maupun negatif yang dihasilkan oleh intervensi program, baik secara langsung maupun tidak langsung, disengaja maupun tidak disengaja.
 5. Keberlanjutan, yaitu manfaat dari suatu kegiatan program masih memiliki keberlanjutan baik dari aspek finansial, sosial, maupun lingkungan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari beberapa sumber, di antaranya:

1. Studi Pustaka: RPD Kabupaten Bantul

- terkait dengan data target 2023-2026, E-sakip dan Monev, Evaluasi Tusi/Kelembagaan;
2. FGD dengan stakeholder;
 3. Wawancara Mendalam (*in depth interview*): personil kunci OPD teknis dan penerima sasaran program/ kegiatan.

Kajian ini menggunakan data kualitatif maupun kuantitatif. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, statistika deskriptif dan menggunakan metode triangulasi dengan menggunakan analisis campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini akan dibahas program yang dievaluasi yang dikaitkan dengan rasio gini yang berkaitan dengan aktivitas yang diintervensi dengan dana keistimewaan.

III. PEMBAHASAN

Terdapat 4 program keistimewaan yang dimiliki oleh DIY yaitu Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan, Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan, dan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang. Dari 4 program tersebut hanya program Penyelenggaraan Keistimewaan

Urusan Kebudayaan yang berkaitan dengan indikator gini ratio. Program tersebut dilaksanakan oleh 4 PD yaitu Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Peternakan (DKPP), Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP), dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP).

Data yang akan digunakan dalam kajian ini yaitu data dari Aplikasi Kenes dan hasil evaluasi dana keistimewaan selama 3 tahun yaitu tahun 2022-2024. FGD dilakukan secara langsung melalui rapat pengendalian dan evaluasi dana keistimewaan yang dilaksanakan secara berkala setiap triwulan dengan peserta yang terdiri dari Bappeda, BKPAD, dan PD pengampu Dais di Kabupaten Bantul, serta wawancara dengan penerima sasaran program/ kegiatan yang dilaksanakan pada saat melakukan monitoring kegiatan kelapangan yang dilaksanakan secara acak (waktu menyesuaikan jadwal).

Tabel 1. Outcome dan Anggaran Dana Keistimewaan Tahun 2022-2024

No	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		Anggaran		
	Dinas	Outcome	2022	2023	2024
1	DKPP	Peningkatan ketersediaan pangan kelompok.	Rp235.000.000	Rp189.252.500	Rp240.000.000
2	DKP	Peningkatan Kemandirian Kelompok Nelayan	-	Rp200.000.000	Rp449.617.500
3	Dinas KUKMPP	Peningkatan kemandirian kelompok IKM	Rp373.115.000	Rp916.291.500	Rp568.996.750
4	Dinas Pariwisata	Peningkatan perkonomian UKM dan masyarakat umum	Rp980.000.000	Rp1.097.750.000	Rp1.099.064.350

Sumber: Aplikasi Kenes, Paniradya DIY. 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, dan dilakukan analisis secara mendalam menggunakan instrumen pelaksanaan Evaluasi Mikro menggunakan metode analisis DAC maka didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Relevansi:

Relevansi adalah kesesuaian sejauh mana program telah berjalan sesuai dengan kelompok sasaran dan penerima. Bappeda secara berkala (pertriwulan atau secara acak) melakukan Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mendukung tercapainya insikator sasaran daerah. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan merupakan satu rangkaian yang saling terkait, di dalam kegiatan

pengendalian, monitoring dan evaluasi yang merupakan satu kegiatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung yaitu menggunakan desk/verifikasi antara Bappeda dengan PD juga ada monitoring lapangan ke lokasi pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan desk/verifikasi dan monitoring evaluasi lapangan akan disampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan nama kegiatan yang dilaksanakan, jumlah pagu yang dianggarkan, bentuk kegiatan (BKK Reguler, BKK Kabupaten atau BKK Kalurahan), Progress kegiatan saat dimonitoring, kendala yang dialami saat pelaksanaan kegiatan, solusi yang diharapkan dari kendala yang dihadapi, dan Bappeda akan memberikan catatan atau rekomendasi dari hasil desk/verifikasi dan monitoring evaluasi lapangan kepada PD pengampu Dais. Secara tidak langsung yaitu PD menyampaikan informasi capaian kinerja dan keuangan Dais kepada Paniradya setiap bulannya melalui rapat bulanan dan aplikasi KENES, laporan pengendalian juga disampaikan dalam setiap tahapan (tahap I, II dan III) untuk monitoring dan evaluasi progress pelaksanaan Dana Keistimewaan dalam format PMK 16 dan format 13 kolom. Dari hasil desk/verifikasi yang dilaksanakan oleh Bappeda maupun

melalui aplikasi, PD pengampu Dais mendapatkan solusi dari kendala kegiatan yang dihadapi baik dalam pencairan anggaran, pelaksanaan kegiatan maupun pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan hal ini sangat berkaitan dengan ketercapaian kinerja kegiatan dan akan mempengaruhi kinerja PD dan kinerja daerah. Berikut kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan dalam evaluasi program kegiatan Dais.

Tabel 2. Outcome dan Intervensi Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2022-2024

No	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		Intervensi Kegiatan		
	Dinas	Outcome	2022	2023	2024
1	DKPP	Peningkatan ketersediaan pangan kelompok.	Bimtek serta pengembangan lumbung mataraman	Pengembangan Lumbung Mataraman	Pengembangan Lumbung Mataraman
2	DKP	Peningkatan Kemandirian Kelompok Nelayan	-	Peningkatan Kapasitas SDM Nelayan	Pengembangan Workshop Pembuatan Perahu Fiber (Kasko) dan Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan
3	Dinas KUK MPP	Peningkatan kemandirian kelompok IKM	Pelatihan IKM : - Keris - Tatah Sungging Lurik - Batik - Kostum pakaian wayang orang - Pembuatan produk Kecantikan Tradisional - Pelatihan Kuliner di rintisan	Pengembangan Kewirausahaan dan Pelaksanaan Festival Klengenan	- Pelatihan Manajemen Pengolaan Usaha, Keuangan, Produk dan Pasar IKM - Jamu/Minuman Herbal - Festival Klengenan

No	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		Intervensi Kegiatan		
	Dinas	Outcome	2022	2023	2024
			Desa Preneur		
4	Dinas Pariwisata	Peningkatan perkonomian UKM dan masyarakat umum	Festival Segoro Kidul dan Gerakan Peningkatan Sadar Wisata dan Sapta Pesona	Festival Segoro Kidul dan Feasibility Study Pengembangan Kawasan Goa Seluman	Festival Segoro Kidul

Sumber: Form PMK16, Paniradya DIY. 2025.

Program kegiatan Dais yang dilaksanakan oleh 4 perangkat daerah penanggung jawab indikator Rasio Gini dan pengampu Dais mayoritas dapat meyakinkan bahwa mereka adalah orang yang tepat menerima manfaat dari program yang ada, bahkan mereka tidak segan untuk membagikan hasil kemanfaatan dari bantuan dana keistimewaan kepada kelompok lain atau orang lain. Namun, bantuan yang ada masih belum cukup maksimal dapat dimanfaatkan oleh karena itu jika ada bantuan lagi diminta untuk bisa melengkapi peralatan yang sudah ada agar capaian dari indikator kinerja maksimal.

2. Efektivitas:

Efektivitas adalah ukuran sejauh mana suatu program telah mencapai tujuannya, efektivitas dapat diukur dengan 2 cara, yaitu melihat capaian kinerja program, dikatakan efektif jika capaian kinerjanya mencapai 100% dan dengan menanyakan langsung manfaat yang diterima/outcome oleh penerima manfaat

program. Dana Keistimewaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh 4 perangkat daerah pengampu dais penanggung jawab indikator rasio gini, dapat disampaikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Dais selama 3 tahun dari tahun 2022-2024.

Tabel 3. Capaian Kinerja Program (%)

No	Program	Dinas	2022	2023	2024	Rata-rata
1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	DKPP	100%	100%	100%	100,00%
2		DKP	0	100%	100%	100,00%
3		Dinas KUKMPP	100%	100%	100%	100,00%
4		Dinas Pariwisata	100%	100%	100%	100,00%

Sumber: Aplikasi Kenes, Paniradya DIY. 2025.

Jika dilihat dari tabel diatas diketahui bahwa dari urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh semua pengampu dais terlihat kinerja program hanya pada Dinas Pariwisata yang mampu mencapai 100%. Hal ini dikarenakan Dais baru masuk ke 3 PD lainnya mulai dari 2022 bahkan DKP baru mulai pada tahun 2023. Akan tetapi secara umum, hampir semua PD pengampu Dais dapat mencapai kinerja program kegiatan Dais sesuai dengan rencana sehingga dapat dikatakan bahwa program kegiatan dais yang dilaksanakan efektif.

Efektivitas atau manfaat yang diterima atau dirasakan oleh audiens antara lain adalah peningkatan kemampuan pengolahan hasil pertanian dan perikanan, peningkatan kemampuan promosi dan pemasaran,

terbantu kebutuhan pangan sehari-hari berasal dari pemanfaatan pekarangan, berkembangnya kelompok yang selama ini menjadi wadah mereka, tambahan input produksi.

3. Efisiensi

Efisiensi adalah ukuran tingkat efisiensi dari output program, baik kualitatif maupun kuantitatif yang berhubungan dengan input. Dapat juga diartikan sejauh mana sebuah program menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang diinginkan atau maksimal. Sebuah program dapat dikatakan efisien adalah jika capaian kerjanya mencapai 100% atau tujuannya tercapai dan realisasi anggarannya kurang dari 100%, jadi untuk mengukur efisiensi hanya bisa dengan memperhatikan serapan anggaran. Berikut serapan anggaran program penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan Kabupaten Bantul tahun 2022-2024.

Tabel 4. Realisasi Anggaran Program (%)

No	Program	Dinas	2022	2023	2024	Rata-rata
1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta	DKPP	99,51 %	98,66 %	99,33 %	99,19 %
2		DKP	0	99,66 %	99,99 %	99,66 %
3	Urusan Kebudayaan	Dinas KUKMP	99,44 %	99,44 %	100%	93,08 %
4		Dinas Pariwisata	99,77 %	99,55 %	99,96 %	99,04 %

Sumber: Aplikasi Kenes, Paniradya DIY. 2025.

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi serapan anggaran Dais secara umum capaian realisasi anggaran Dais sudah diatas 90% sehingga bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan sudah efisien namun masih belum maksimal karena secara keseluruhan masih berada dibawah 100%. Meskipun kinerja sudah 100% tetapi anggaran tidak terserap 100% artinya bahwa terjadi deviasi antara pelaksanaan dan perencanaan sehingga menyebabkan anggaran masih tidak terserap semua.

Salah satu efisiensi dari pelaksanaan keistimewaan di DKP Kabupaten Bantul yaitu membantu nelayan mengurangi biaya pembelian kapal dan perawatan kapal, dengan ilmu yang diperoleh selama pelatihan diharapkan nelayan bisa membuat kapal kasko sendiri dan merawat kapal sendiri jika terjadi kerusakan bisa juga memperbaiki sendiri karena diketahui bahwa biaya perawatan dan bengkel kapal sangat mahal. Sebagai pengguna anggaran keistimewaan Dais DKP memahami progress pelaksanaan kegiatan harus dilaporkan dan kinerja yang diharapkan dapat tercapai, setiap pelaksanaan pengendalian oleh tim Bappeda DKP melakukan pendampingan

dan menyampaikan tiap tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan juga permasalahan yang dihadapi karena DKP memahami juga bahwa kinerja dari kegiatan tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja daerah.

4. Dampak

Dampak adalah perubahan baik yang bersifat positif maupun negatif yang dihasilkan oleh intervensi program, baik secara langsung maupun tidak langsung, disengaja maupun tidak disengaja. Dampak tidak bisa diukur secara kuantitatif, sehingga untuk mengukur dampak lebih tepat menggunakan eksploratif kualitatif. Dampak yang dirasakan penerima program keistimewaan adalah peningkatan keterampilan produksi dan pemasaran, bertambahnya akses penjualan, meningkatnya kemampuan untuk mandiri dalam aktivitas ekonomi, dan bertambahnya variasi produksi atau olahan. Akan tetapi dampak yang tersebut di atas belum dirasakan oleh semua penerima program. Sebagai contoh adalah dampak pada Program Peningkatan ketersediaan pangan kelompok., peningkatan hanya dirasakan bagi penerima manfaat pada saat program dilaksanakan, setelah program selesai

program tidak dapat berkembang sesuai yang diharapkan, program yang dilaksanakan hanya terbatas pada percontohan.



Gambar: kegiatan pembangunan Demplot oleh DKPP

Akan tetapi kegiatan lain yang diharapkan mampu meningkatkan kemampuan kemandirian nelayan, kemampuan industri rumah tangga dan kemampuan melihat peluang pemasaran dapat juga dihasilkan dari berbagai kegiatan keistimewaan seperti:



Gambar: Pelatihan pengolahan Ikan diharapkan akan meningkatkan pendapatan keluarga nelayan

Meskipun dampak tersebut di atas merupakan ukuran mikro tidak dapat

dikaitkan langsung dengan peningkatan rasio Gini yang merupakan ukuran makro. Untuk mengaitkannya dibutuhkan ukuran-ukuran antara yang menjembatani antara dampak secara mikro dan dampak secara makro. Untuk mengaitkannya dipilih dua indikator antara, yaitu produktivitas, pendapatan, inflasi dan kemiskinan. Jika dampak dari tiap-tiap program dapat meningkatkan produktivitas, maka diharapkan pendapatannya meningkat sehingga pengeluarannya juga akan meningkat dan akhirnya pengeluaran penerimaan manfaat yang tadinya di bawah garis kemiskinan menjadi di atas garis kemiskinan, karena daya beli masyarakat meningkat diharapkan laju inflasi daerah akan menurun sehingga ketimpangan atau rasio gini bisa ditekan atau menurun.

5. Keberlanjutan

Keberlanjutan adalah manfaat dari suatu kegiatan program masih memiliki keberlanjutan baik dari aspek finansial, sosial, maupun lingkungan. Dengan kata lain, manfaat yang ada tetap diterima meskipun program sudah selesai.

Dari empat program keistimewaan yang diamati, ada yang manfaatnya berlanjut dan tidak berlanjut setelah berakhirnya program. Manfaat yang berlanjut dapat

berwujud fisik maupun non fisik. program bantuan peralatan produksi dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan bahkan bisa ditingkatkan dengan menggunakan hasil dari kegiatan yang dilaksanakan, pelatihan yang diberikan memberikan kemampuan kepada individu yang dilatih dan diharapkan akan melanjutkan kemampuan mereka kepada pihak lain agar tujuan dari kegiatan untuk mensejahterakan masyarakat dapat terwujud.

Selain permasalahan berlanjut dan tidaknya manfaat sebuah program, banyak informan yang justru berharap mendapatkan bantuan program lagi, baik program yang sama (untuk penerima manfaat yang sama dengan jumlah yang lebih banyak ataupun penerima manfaat lainnya) maupun program yang lain yang diharapkan menjadi pelengkap program yang sudah berjalan. Contoh dari program yang masih diharapkan keberlanjutannya adalah penambahan alat produksi dengan kapasitas yang lebih besar, pelatihan pengemasan yang bisa membuat hasil produksi menjadi bisa bertahan lebih lama, pelatihan pemasaran agar produksi lebih luas dikenal masyarakat, penambahan peralatan perbengkelan agar tidak

menyewa alat kepihak lain, dan pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi keahlian.

Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan dana keistimewaan dalam upaya pemerataan pendapatan berdasarkan relevansi, efektifitas, efisiensi, dampak dan keberlanjutan di Kabupaten Bantul, alternatif kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Agar sasaran pelaksanaan dana keistimewaan sesuai dengan kebutuhan dapat dilakukan melalui proses penilaian dari dukuh atau pamong kalurahan yang membidangi dan dibahas dalam musyawarah. Hasil keputusan dalam musyawarah tersebut menjadi dasar pengusulan untuk menyampaikan usulan kebutuhan dan jenis intervensi dibutuhkan kepada PD pengampu Dais.
2. Intervensi pelaksanaan dana keistimewaan yang diberikan memberikan manfaat yang besar bagi penerima manfaat. Sehingga perlu untuk dikembangkan baik kualitas dan kuantitas dari intervensi yang sudah diberikan seperti pelatihan pengemasan produk (*Packaging*) ramah lingkungan dan pemasaran produk digital, serta menambah kelompok pelatihan.
3. Seluruh anggaran yang dialokasikan dalam intervensi pelaksanaan dana keistimewaan dapat digunakan sesuai dengan rencana, memungkinkan adanya penambahan alokasi jika akan menambah jumlah kelompok pemanfaat dan jenis pelatihan atau kegiatan maka alokasi anggaran juga dibutuhkan.
4. Hasil intervensi menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyelenggaraan pelatihan yang memberikan wawasan, serta meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan keterampilan kepada masyarakat untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Beberapa penerima manfaat dapat mengembangkan usahanya. Intervensi ini juga menciptakan unit-unit usaha baru yang juga didampingi pengembangannya. Dinamika tersebut menciptakan tumbuhnya UMKM di pedesaan menjadi usaha yang lebih maju. Hal itu mendukung peningkatan pendapatan bagi penduduk lokus penerima manfaat, yang artinya juga masih dibutuhkannya pendampingan dalam

pengembangan baik kualitas maupun kuantitas intervensi maupun penerima manfaat.

5. Upaya intervensi ini dapat berpotensi untuk terus berlanjut melalui perluasan anggota kelompok penerima manfaat, pengembangan usaha dari masyarakat yang sudah menerima juga dapat diteruskan melalui aktivitas organisasi secara lebih luas. Lebih lanjut berbagai event dapat menciptakan permintaan yang mendorong peningkatan produksi lokal seperti permintaan produk kuliner local, bazar produk local dan lainnya.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Dari hasil evaluasi dan analisis terhadap pelaksanaan dana keistimewaan dalam upaya pemerataan pendapatan menggunakan metode DAC diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari sisi relevansi, mayoritas penerima manfaat menyatakan bahwa program keistimewaan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka.
2. Dari sisi efektivitas, mayoritas program dapat dikatakan efektif. Pada umumnya, informan dapat menjelaskan dengan baik *outcome*

dari setiap kegiatan yang dilaksanakan.

3. Dari sisi efisiensi, mayoritas program dapat dikatakan efisien dengan tercapainya kinerja program tersebut.
4. Dampak diukur dengan melihat akibat lanjutan dari outcome yang telah dirasakan. Meskipun tidak semua penerima program keistimewaan dapat mengindikasikan bahwa outcome yang dirasakan dari program berdampak pada peningkatan produktivitas, pendapatan, inflasi dan kemiskinan (secara mikro) yang diharapkan dapat menurunkan rasio gini (secara makro).
5. Dari sisi keberlanjutan, sebagian besar program manfaatnya tetap berlanjut meskipun program tersebut telah selesai dan ada yang tidak. Mayoritas penerima manfaat menyatakan bahwa masih dibutuhkan program lanjutan yang sama atau berbeda (program lainnya) agar berdampak pada peningkatan produktivitas dan pendapatan (secara mikro)

sehingga secara agregat berdampak pada penurunan rasio gini (secara makro).

4.2 Rekomendasi

Dari kesimpulan hasil evaluasi pelaksanaan program keistimewaan di Kabupaten Bantul terhadap kinerja indikator sasaran daerah dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat program sehingga program lebih berdampak secara mikro pada peningkatan produktivitas, pendapatan, laju inflasi dan tingkat kemiskinan yang secara makro diharapkan dapat menurunkan rasio gini.
2. Meningkatkan jumlah penerima manfaat program sehingga peningkatan produktivitas, pendapatan, laju inflasi dan tingkat kemiskinan agar secara makro lebih mempercepat penurunan rasio gini di Kabupaten Bantul.
3. Meningkatkan koordinasi antar PD dan Paniradya sehingga meningkatkan sinkronisasi dan keberlanjutan program-program yang ada, seperti:
 - a. DKPP dapat meningkatkan jumlah dan pengembangan lumbung mataram.
 - b. DKP dapat meningkatkan kemandirian dan kapasitas nelayan baik perikanan budidaya maupun tangkap melalui pelatihan perbengkelan peralatan perikanan, pengolahan perikanan, dan pemasaran hasil perikanan.
 - c. DKUKMPP dapat meningkatkan kemandirian IKM melalui berbagai pelatihan dari pembuatan, pengolahan, pemasaran maupun pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan kelokalan setiap dusun.
 - d. Dinas Pariwisata dapat meningkatkan event-event kelokalan yang dapat menarik wisatawan yang kemudian menjadi peluang bagi UKM/IKM memasarkan produk lokal yang telah dihasilkan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bappeda Kabupaten Bantul (2025). <https://esakip.kab-bantul.id/>
- [2] BPS. (2025). Berbagai Publikasi. <https://www.bps.go.id/>
- [3] OECD. (1998). *Review of The DAC Principles of Development Assistance*. Paris: DAC Working Party on Aid Evaluation.

- [4] Paniradya DIY. (2025).
<https://kenes.jogjaprovo.go.id/>
- [5] Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Dana
Keistimewaan (Berita Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2019
Nomor 85)
- [6] Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021
Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Nomor
140);
- [7] Peraturan Bupati Bantul Nomor 56
Tahun 2022 Perubahan tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2021-2026 (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor
56);